

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang memiliki berbagai macam pulau, daerah, dan bentuk geografis yang berbeda. Sehingga menciptakan beragam budaya, suku, etnis, ras, agama, serta ideologi. Itu merupakan kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga menciptakan berbagai keyakinan yang berbeda khususnya dalam bidang agama.

Keanekaragaman di Indonesia merupakan kekayaan historis yang menjadi citra diri bangsa Indonesia, hal tersebut terintegrasikan dalam semboyan bangsa Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menjadi cita-cita luhur yang harus dimiliki dan dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, kemajemukan adalah fenomena nyata di Indonesia. Keragaman terdapat diberbagai kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. keberagaman bukan hanya terjadi dalam lingkup kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam lingkup kecil seperti rumah tangga. Bisajadi, individu-individu dalam suatu rumah tangga menganut agama berbeda.

Saat ini semakin sulit mencari suatu negara yang seluruh masyarakatnya menganut agama yang seragam (*uniform*), contohnya agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia cukup banyak, baik agama besar, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha maupun agama-agama lokal yang hanya dianut ratusan orang, seperti Kaharingan, Waktu Telu, Sunda Wiwitan, dan Tolotang. Bahkan, walaupun ada suatu masyarakat yang hanya menganut satu agama, prularitas bisa terjadi pada level penafsiran atas ajaran agama itu. Prularitas pada wilayah tafsir ini pada

gilirannya akan melahirkan pluralitas pada level aktualisasi dan kelembagaannya.

Menjadi negara plural tentunya memiliki banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu adanya pluralitas membutuhkan sikap yang bijaksana dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat tersebut.

Menurut Budi Munawar dalam Arifin (2009:84) pluralitas tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keberagaman. Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme perawatan, pengawasan, dan pengimbangan yang dihasilkannya.

Dalam konteks ini, negara Indonesia sebagai salah satu penghuni benua di dunia memiliki budaya dan kebudayaan yang sangat beragam, baik dari segi suku, bahasa, agama, sosio-politik dan sebagainya. Keragaman tersebut banyak menimbulkan *ethnosentris* dan menyebabkan konflik kebudayaan yang sering terjadi. Dalam hal ini banyak contoh, misalnya konflik suku, konflik organisasi, konflik keagamaan, dan sebagainya. Menurut Ali Maksum (2011:153) Konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi ciri khas, yaitu : 1). Masyarakat terbagi dalam berbagai bentuk kelompok latar belakang budaya dan sub-budaya yang berbeda. Perbedaan yang seperti itu menimbulkan *cluster-cluster* dalam masyarakat yang mana masyarakat belum mampu untuk menyikapinya. 2). Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang saling tidak melengkapi. Struktur yang ada tidak menjadi sistem yang bermuara pada satu tujuan, melainkan hanya struktur yang bersifat eksklusif semata. 3). Kurang adanya kemauan untuk

mengembangkan musyawarah antara masyarakat dalam hal nilai-nilai sosial yang fundamental. Terkadang musyawarah lebih mengedepankan sisi formalnya daripada substansinya. Hal ini yang menjadikan sebuah penyakit bagi lembaga masyarakat yang menyukai sisi formal dari musyawarah. 4). Kurangnya kesadaran mengembangkan musyawarah dan sering berkembang konflik antar sub-budaya tersebut. Dalam hal ini, konflik yang sering terjadi merupakan akibat dari bagaimana sistem hukum yang menanganinya. 5). Konflik dapat dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi dengan jalan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi. Pada era globalisasi ini, Negara kita memang jauh tertinggal dalam berbagai bidang, sifat ketergantungan tersebut hanya akan menyebabkan hilangnya kemandirian dan akan selalu menyangkal sebagai Negara yang berkembang. 6). Adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain. Dominasi yang seperti ini sering menimbulkan cluster dalam berbagai kelompok, kelompok minoritas sering terintimidasi dan termarginalkan oleh kelompok yang lebih dominan.

Berdasarkan Karakteristik di atas bisa kita ketahui bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang labil. Walaupun ada simbol perdamaian, namun perdamaian tersebut masih berkonotasi negatif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konflik antar suku, ras agama terus bermunculan dewasa ini, baik dalam masalah ideologis, politik, bahkan dalam pendidikan. Hal ini menjadi penting untuk menyadari dan mencari solusi tentang masalah multikultural melalui pendidikan nasional dan ajaran Islam sebagai budaya negeri ini.

Aburahman Wahid adalah salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme masyarakat yang bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalah pahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling

mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain memberi dan menerima (*take and give*).

Abdurrahman Wahid mencoba tidak hanya menggunakan hasil pemikiran islam tradisional namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah hukum (*qawaid fiqhiyah*) serta pemikiran kesarjanaan barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual. seperti ditegaskan Nurcholish Madjid suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaharuan dari nol, melainkan mesti bersedia, bertaqlid, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu. Namun, warisan-warisan masa lalu tidak sekedar dihargai sekaligus juga dihadapi secara kritis agar lahir pemikiran-pemikiran kreatif. Tanpa adanya penghargaan terhadap warisan keilmuan klasik, maka proses pemikiran kultural akan terjadi.

Konsep pluralisme yang diusung K.H. Abdurrahman Wahid tidak hanya pada tataran pemikiran saja, melainkan menjadi sebuah tindakan politik. Ketika menjabat presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid memulihkan hak politik etnis Tionghoa. Abdurrahman Wahid memperlakukan kelompok-kelompok minoritas sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di mata hukum. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa kelompok minoritas mempunyai hak yang sama untuk menunjukkan identitasnya. Gagasan pluralisme Abdurrahman Wahid dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Perbedaan harus dipahami sebagai fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun keselarasan.

Pluralitas hakikatnya adalah sunnatullah yang memang Tuhan menciptakan manusia didalam kategori bersuku-suku, beretnis, atau berbangsa yang berbeda-beda. Rasa persatuan dan kerukunan beragama.

Melihat keberagaman masyarakat Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, agama, budanya, ras, memicu terjadinya konflik terutama dalam

aspek keagamaan, agama merupakan hal yang sensitif karena berbicara tentang keyakinan setiap individu. Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan isu keagamaan, seperti pembakaran tempat ibadah, terorisme, dan pelecehan tokoh agama hangat diberitakan media masa. Prilaku-prilaku tersebut merupakan sikap intoleransi beragama, sehingga pluralisme hadir sebagai solusi dalam menjawab permasalahan intoleransi beragama.

Pluralisme hingga saat ini masih menjadi salah satu pola hidup masyarakat, ditengah krisis toleransi beragama di Indonesia. Beragamnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama mendorong keharusan sikap pluralisme yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Banyak terjadi konflik karena keberagaman tersebut khususnya yang berkaitan dengan keagamaan, untuk itu perlu adanya solusi dari permasalahan terkait keagamaan dalam masyarakat kota Cirebon..

Pluralisme yang ditekankan Gusdur adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir, sehingga peneliti mencoba mengkaji lebih dalam pluralisme dalam pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid dan melihat bagaimana dampak pada sikap toleransi masyarakat kota Cirebon yang ditulis dengan judul “PLURALISME DALAM PEMIKIRAN K.H ABDURRAHMAN WAHID RELEVANSINYA DENGAN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA MASYARAKAT INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pluralisme yang masih belum bisa diterima secara komprehensif di kalangan masyarakat Indonesia.
2. Rendahnya sikap toleransi masyarakat Indonesia akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai pluralis dalam kehidupan sehari-hari

C. Fokus Kajian Penelitian

Melihat banyaknya permasalahan tentang Intoleransi Beragama terutama paham ekstrim radikalisme di Indonesia, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang toleransi beragama, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada lingkup mengenai Pluralisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid relevansinya dengan sikap toleransi beragama masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Toleransi beragama guna terciptanya perdamaian di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana perkembangan pluralisme di Indonesia?
2. Bagaimana pluralisme dalam pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid?
3. Bagaimana Pluralisme dalam pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid relevansinya dengan sikap toleransi beragama masyarakat di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perkembangan pluralisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pluralisme dalam pemikiran K.H Abdurrahman Wahid.
3. Untuk mengetahui pluralisme dalam pemikiran K.H Aburrahman Wahid relevansinya dengan sikap toleransi beragama masyarakat di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan pemahaman pluralisme dan toleransi beragama masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama masyarakat Cirebon agar meminimalisir ekstrim radikalisme di masyarakat.

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mendapat manfaat mengenai internalisasi nilai-nilai pluralisme dengan landasan keislaman menurut perspektif Abdurrahman Wahid untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama masyarakat, agar kelak ketika peneliti terjun di masyarakat bisa mengimplementasikan hasil penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai pluralisme di masyarakat agar bisa meminimalisir sikap dan tindakan ekstrim radikalisme yang masih banyak terjadi hingga saat ini. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat agar menanamkan sikap toleransi beragama dalam kehidupan sehari-harinya guna menjaga ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

- c. Bagi lembaga pendidikan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan sikap toleransi antar siswa maupun pendidik di lembaga pendidikan tersebut.